

PERAN BAHASA DALAM KOMUNIKASI POLITIK

Christina Purwanti

Dosen Universitas Pelita Harapan Jakarta

christina.purwanti@uph.edu

Abstract; *The existence of language in political communication is very interesting to study. Language is no longer viewed neutrally. The meaning of words, phrases, clauses, sentences, and paragraphs must be understood and understood more than literal meaning, literal meaning, or grammatical meaning. The meaning of language is always obedient to its users in political communication. It can be said that in the practice of political communication, language is always used which is very dynamic and flexible according to the context, situation, and goals of the communicator. Language has power in political communication. Language, on the one hand, has the meaning of agreement as an instrument and expresses symptoms that occur socially which are always free from intervention by power. On the other hand, language can be an instrument capable of presenting itself and providing space and as an arena for various interests and powers. Thus, the existence of language becomes symbols and signs that always present a very specific interest in political communication. Language can shape and educate all human life. In political communication, language is not a neutral tool. Language has the power to always change, the power of language that can destroy, and also can build. So language has a very prominent power in meaning, value, and purpose in the language itself in communicating. Here the level of language use begins to shift; starting from the use of words, the use of statements, the use of text and finally the context itself. In other words, more clearly, the words in the language of a ruler or those who are in power must be able to relate to the context. Likewise, statements in language as a ruler must also be in accordance with the context; Likewise a text that is displayed in the news, in addition to the autonomy of a text, the text must also originate from a context. Language and political communication are highly dependent on “words”, “sentences”, “text” and “context”. the essence of political communication, the expression of the truth of human life as a human being as a communicant in a society that uses a very diverse language in which it is a creature that speaks, a creature who speaks, a creature that has an interest in political communication. Language has power in political communication. This article is written to describe the existence of language in political communication using an interdisciplinary approach.*

Key words: *communications, language, meaning, political communication, power*

Abstrak ; Eksistensi bahasa dalam komunikasi politik sangat menarik untuk dikaji. Bahasa tidak lagi dilihat secara netral. Makna kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf harus dimengerti dan dipahami lebih dari makna literal, makna harfiah, ataupun makna gramatikal. Makna bahasa selalu taat pada penggunaannya dalam komunikasi politik. Dapat dikatakan dalam praktik komunikasi politik selalu digunakan bahasa yang sangat dinamis dan lentur sesuai dengan konteks, situasi, dan tujuan komunikator. Bahasa memiliki kekuatan dalam komunikasi politik. Bahasa, di satu pihak mempunyai makna kesepakatan sebagai instrumen serta mengekspresikan gejala yang terjadi secara sosial yang selalu bebas atas intervensi kekuasaan. Di lain pihak, bahasa itu dapat menjadi instrumen yang mampu menghadirkan diri dan memberi ruang dan sebagai arena untuk berbagai kepentingan dan kekuasaan itu sendiri. Dengan demikian, eksistensi bahasa menjadi simbol dan tanda yang selalu menghadirkan kepentingan yang sangat spesifik dalam komunikasi politik. Bahasa bisa membentuk dan mendidik seluruh hidup manusia. Dalam komunikasi politik, bahasa bukanlah sebuah *tool* netral. Bahasa memiliki kekuatan untuk selalu mengubah, kekuatan bahasa yang bisa menghancurkan, dan juga bisa membangun. Jadi bahasa itu punya *power* yang sangat menonjol dalam makna, nilai, dan tujuan di dalam bahasa itu sendiri dalam berkomunikasi. Di sini tingkat penggunaan bahasa pun mulai mengalami pergeseran; mulai dari penggunaan kata, penggunaan pernyataan, penggunaan teks dan akhirnya konteks itu sendiri. Dengan kata lain secara lebih jelas adalah kata-kata dalam berbahasa sebagai seorang penguasa atau yang sedang berkuasa harus bisa berelasi dengan konteks. Demikian juga pernyataan dalam berbahasa sebagai seorang penguasa haruslah juga sesuai dengan konteks; Demikian juga sebuah teks yang ditampilkan dalam pemberitaan, selain otonomnya sebuah teks, teks tersebut pun harus bermuara dari sebuah konteks. Bahasa dan komunikasi politik, sangat tergantung pada “kata”, “kalimat”, “teks” dan “konteks”. Inilah juga menjadi hakikat dalam komunikasi politik, ungkapan kebenaran hidup manusia sebagai manusia sebagai seorang komunikator dalam sebuah masyarakat pengguna bahasa yang sangat beragam yang di dalamnya adalah makhluk yang berkata, makhluk yang berbahasa, makhluk yang mempunyai kepentingan dalam komunikasi politik. Bahasa memiliki kekuatan dalam komunikasi politik. Tujuan penulisan artikel ini untuk mendeskripsikan manfaat bahasa dalam komunikasi politik dengan menggunakan pendekatan interdisipliner.

Kata kunci: bahasa, kekuasaan, komunikasi, komunikasi politik, makna.

PENDAHULUAN

Perlu disadari dari awal bahwa dengan bahasa, manusia dapat bertindak dalam berbagai bidang kehidupan mulai dari bidang yang sedang dibahas ini yakni komunikasi politik, sampai pada bidang sosial, bidang hukum, di mana keseluruhan bidang tersebut selalu bertitik tolak pada peran bahasa.

Dalam berbahasa, hal penting yang perlu diperhatikan adalah makna bahasa, nilai bahasa, tetap dijadikan sebagai titik tolaknya. Secara historis dapat dikatakan bahwa seluruh perubahan dalam lingkup hidup manusia, dibangun melalui makna dan nilai dari sebuah bahasa. Seorang pemikir terkenal, Aristoteles misalnya, sangat memprioritaskan makna dan fungsi bahasa yang selalu menyiratkan sebuah kebenaran dalam berkomunikasi, apalagi komunikasi politik. Bahasa bisa hadir untuk mengoreksi seluruh proses berpikir manusia dan doktrin para dewa yang menyimpang dari semangat dan pola berpikir.¹

¹Bdk. Pemahaman ini terdapat di dalam, Yudi Latif dan Idy Subandi Ibrahim (Ed), *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*, (Bandung: Mizan, 1996), hal. 15

Dalam dunia politik mulai dari penalaran ilmu yang mampu mengubah peradaban polis dalam sebuah organisasi pada level yang paling tinggi yang disebut negara; seorang ilmuwan komunikasi politik² memainkan peranan penting dalam berbahasa.

Dengan konsep teori dan pemikiran yang dimilikinya lewat bahasa, ilmuwan komunikasi politik mampu menelaah setiap problem secara baik dan bisa mampu membedah sekaligus pada saat yang sama membedakan mana yang disebut problem komunikasi politik yang sesungguhnya yang ditemukan dan didekati dalam lapangan penelitian melalui bahasa.

Penggunaan bahasa dalam komunikasi politik yang sering ditemukan di lapangan, segera dibutuhkan penanganannya secara tepat oleh seorang penutur bahasa bukanlah seorang komunikator politik yang lebih membutuhkan penanganan politik yang lebih cepat dan lebih melihat hasilnya secara parsial daripada berlama-lama menelaah problem bahasa secara detail

²William Ebenstein, *Great Political Thinkers, Plato to Present*. Third Edition, New York, Oxford University Press, 1996. P. 474

untuk melihat masa depan sebuah keputusan melalui bahasa di dalam berkomunikasi.

Seorang komunikator politik di lapangan selalu cepat melihat hasilnya. Baik komunikator politik yang cenderung berada di dalam kelas dan lapangan penelitian, maupun komunikator politik yang selalu hadir dalam setiap problem sosial dalam praktik lapangan; keduanya selalu berhutang pada bahasa dalam membedah dan membedakan setiap persoalan dalam berkomunikasi atau pun setiap pergumulan sosial yang muncul ketika bahasa itu digunakan dalam berkomunikasi. Bahasa selalu tunduk pada penggunaannya. Di sinilah aspek bahasa memainkan fungsi sentral dalam setiap aktivitas komunikasi politik.

Kekuatan Bahasa dalam Komunikasi Politik

Bahasa, di satu pihak mempunyai makna kesepakatan sebagai instrumen serta mengekspresikan gejala yang terjadi secara sosial yang selalu bebas atas intervensi kekuasaan. Di lain pihak, bahasa itu dapat menjadi instrumen yang mampu menghadirkan diri dan memberi ruang dan sebagai arena untuk berbagai kepentingan

dan kekuasaan itu sendiri. Dengan demikian, eksistensi bahasa menjadi simbol dan tanda yang selalu menghadirkan kepentingan yang sangat spesifik dalam komunikasi politik. Misalnya pemerintahan zaman ORBA (Orde Baru), merekonstruksi bahasa sebagai alat untuk mempertahankan sebuah kekuasaan; dan hal ini telah terbukti selama 32 tahun dalam masa kekuasaan rezim Soeharto. Ucapan atau diksi khas dari pemerintahan Soekarno seperti “revolusi”, “kontra-revolusi”, “neo-kolonial”, “kapitalisme-imperialisme”, “Nasakom”, “Manipol-Usdek”, “indoktrinasi”, “demokrasi terpimpin”, sengaja dihilangkan pada zaman pemerintahan Soeharto. Diksi tersebut digantikan dengan kata-kata: “pembangunan”, “anti-pembangunan”, “lepas landas”, “stabilisasi nasional”, “demi keamanan”, “pembangunan ekonomi”, “swasembada pangan”; Deretan kata/ frase tersebut merupakan deretan bahasa yang dibentuk sebagai ciri khas wacana politik Orde Baru. Seorang ahli bahasa, Bosmajian,³ memberikan penegasan bahwa konteks penggunaan bahasa pada

³ Bdk. Haig Bosmajian, Yang telah menganalisis secara rinci di dalam, *The Language of Operation*, (Washington, DC: Public Affairs Press, 1989), hal. 5-6

zaman Soekarno, maupun zaman Soeharto, sangat sejalan dengan kepentingannya dan selalu merugikan bagi yang kurang berkuasa.

Bahasa bisa membentuk dan mendidik seluruh hidup manusia. Peran bahasa menjadi sangat penting. Makna bahasa terbentuk sesuai perkembangan manusia sejak kecil sesuai kepentingannya. Sebuah kalimat sebagai contoh untuk mengungkapkan kepentingan: “kamu anak brilian”. Bila kalimat itu diucapkan oleh seorang ayah pada anaknya secara konsisten, maka sebagai respon positifnya sesuai dengan kalimat tersebut si anak menjadi anak yang brilian. Begitu juga jika seorang dokter mengatakan kepada pasiennya bahwa “kamu akan segera sehat” dengan menelan obat ini. Sebetulnya pada saat yang sama, bahasa memiliki kekuatan yang mengubah; memberikan sugesti kepada si sakit tersebut, sehingga proses penyembuhannya berjalan dengan cepat. Makna bahasa dalam setiap contoh tersebut selalu mengungkapkan kepentingan yang ada di dalamnya. Problem penggunaan bahasa seperti inilah yang dinamakan problem bahasa dalam komunikasi politik.

Dalam komunikasi politik, bahasa bukanlah sebuah *tool* netral⁴. Bahasa memiliki kekuatan untuk selalu mengubah, kekuatan bahasa yang bisa menghancurkan, dan juga kekuatan bahasa yang juga bisa membangun. Sebuah negara dapat dikatakan menjadi negara yang baik atau buruk, hal yang bisa diukur adalah dari bahasa para komunikator politiknya, harus mampu memformulasikan bahasa dalam setiap keputusan yang mau diambil.

Presiden Soekarno dan para fundator NKRI, ketika mencetuskan sebuah ucapan lewat bahasa dalam komunikasi politik: “Merdeka atau mati”! Ungkapan itu bukanlah sekedar sebuah diksi yang netral. Ungkapan itu adalah sebuah diksi yang penuh dengan makna bahasa dan nilai bahasa serta menumbuhkan sebuah daya. Bahasa juga dapat memberikan semangat bagi para penuturnya. Bahasa itu dapat memberi spirit atau dapat memberi semangat⁵. Contoh konkrit dari Pak Harto ketika menjelang jatuhnya, Pak Harto berucap: yang menentang aturan atau yang menentang konstitusi, akan “digebuk”.

⁴Armada Riyanto, *Berfilsafat Politik*, Yogyakarta, Kanisius, 2011, hal. 64.

⁵ Christina Purwanti., *Jurnal Law Review*, Vol. XIV, No. 3 – Maret 2015, hlm. 453. Jurnal Universitas Pelita harapan.

Konteks kata ‘digebuk’ tidaklah memiliki makna yang biasa. “ Digebuk” adalah sebuah kata yang bersifat teror dan menakutkan. Kata ini bisa mengandung arti bahwa semua orang Indonesia saling “gebuk-menggebuk”. Dalam konteks ini, seseorang yang dengan sangat berani, dan sangat mampu mengungkapkan sebuah kekuasaan yang dalam hal ini, atau pada bagian ini terlihat absen terhadap pertimbangan bahasa; bahwa bahasa itu punya *power* yang sangat mengganjal dalam makna, nilai, dan tujuan di dalam bahasa itu sendiri dalam berkomunikasi. Di sini tingkat penggunaan bahasa pun mulai mengalami pergeseran; mulai dari penggunaan kata, penggunaan pernyataan, penggunaan teks dan akhirnya konteks itu sendiri. Dengan kata lain secara lebih jelas adalah kata-kata dalam berbahasa sebagai seorang penguasa atau yang sedang berkuasa harus bisa berelasi dengan konteks. Demikian juga pernyataan dalam berbahasa sebagai seorang penguasa haruslah juga sesuai dengan konteks; Demikian juga sebuah teks yang ditampilkan dalam pemberitaan, selain otonomnya sebuah teks, teks tersebut pun harus bermuara dari sebuah konteks.

Bahasa dan komunikasi politik, sangat tergantung pada “kata”, "kalimat”,

“teks” dan “konteks”. Inilah juga menjadi hakikat dalam komunikasi politik, ungkapan kebenaran hidup manusia sebagai manusia sebagai seorang komunikan dalam sebuah masyarakat pengguna bahasa yang sangat beragam (Bhinneka Tunggal Ika); yang di dalamnya adalah makhluk yang berkata, makhluk yang berbahasa, makhluk yang mempunyai kepentingan dalam komunikasi politik. Seorang kritikus sastra berkebangsaan Belanda A.A Teew , seperti yang dikutip oleh Armada Riyanto,⁶ sempat memberi judul pada salah satu bukunya , “Tergantung pada Kata (bahasa)”. Di sini sastra (baca: komunikasi politik) beroperasi dengan mengandaikan daya konotatif yang dimiliki kata, kata yang dapat membangkitkan imajinasi, kata yang mampu menggugah rasa, kata yang berkuasa menghidupkan angan-angan. Komunikasi politik juga hidup dari kekuatan yang dimiliki kata. Kata yang menembus batas pemaknaan sehari-hari dalam berpolitik (komunikasi politik), yang sering terdengar lumrah dan biasa-biasa serta membuka sebuah dunia pengalaman yang lain sekali pun. Dalam perspektif bahasa, kita bisa mengatakan bahwa komunikasi politik juga hidup dari

⁶Ibid., hlm. 64.

bahasa dan mengandalkan bahasa; Di sinilah, komunikasi politik dan bahasa memiliki kekuatan.

Keyakinan sebuah kata dalam bahasa yang diungkapkan, sebetulnya mengekspresikan kebijaksanaan dan keyakinan dari sekelompok masyarakat atas ideologi yang diyakini. Dalam konteks sosial, bahasa menjadi sangat berarti dalam seluruh fakta sosial yang dihadapi oleh manusia. Dalam berkomunikasi, manusia menggunakan bahasa untuk memaknai sebuah fakta sosial yang melingkupinya. Yudi Latif berpendapat bahwa; siapa pun manusia tentu menggunakan bahasa sesuai dengan fakta sosialnya dengan memperhatikan struktur bahasanya. Pada akhirnya, bahasa itu mempunyai nilai sendiri dan tujuan tersendiri untuk menciptakan realitas sosial dalam komunikasi politik manusia.⁷

Dalam kehidupan sehari-hari terdapat pemahaman, tentang peran dan penggunaan sebuah bahasa selalu terikat pada kebutuhan dan berbagai

⁷ Beberapa sosiolog yang kental dengan argumentasi ini adalah Thomas Luckmann, Peter L. Berger, atau Alfred Schutz .lihat misalnya, Berger dan Luckmann, *The Social Construction of Reality* (Garden City, N.Y: Doubleday 1966); dan Schutz *The Phenomenology of Social World* (Evanston: North Western University Press, 1967).

kepentingan,⁸ karena bahasa selalu *disetting* menurut kondisi tertentu, untuk sebuah kepentingan yang sangat khusus di dalam komunikasi politik⁹. Dari sini, makna dan nilai bahasa sangat bergantung pada penggunaannya. Bahasa digunakan dalam konteks kesadaran dalam aktivitas komunikasi politik mengemukakan empat variabel penting yakni: pertama, bahwa seluruh realitas harus bisa digambarkan dalam bahasa. Kedua, lewat bahasa, sebuah gambaran faktual dapat terjadi. Ketiga, lewat bahasa sebuah gambaran realitas dapat terwakili dalam sebuah proposisi, kalimat. Keempat, kapasitas bahasa tak mampu dijelaskan oleh logika karena bahasa telah mendudukkan sebuah perkara dalam suatu realitas.¹⁰

Relasi antara Bahasa dan Kekuasaan dalam Komunikasi Politik

⁸Bdk. F. Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme dan Mordenitas*, Yogyakarta, Kanisius, 2003, hlm. 47.

⁹ Lihat, Ari Sulistyanto, dalam; *Militia*. Vol.1/1/1/2011, Maret 2011. Jurnal Universitas Bung Karno, hlm. 11.

¹⁰ Perlu diketahui, meskipun para filosof Yunani seperti Socrates telah meyakini arti penting bahasa sebagai pengungkap kebenaran, namun pada era ini bahasa masih belum menemukan kajian teoritik-empiris tentang bagaimana bahasa melakukan konstruksi sosial dalam masyarakat. Teori-teori post modern lah yang meletakkan batu pertama paradigma ini.

Dalam komunikasi politik, setiap naskah akademik yang tertuang melalui sebuah bahasa, selalu membutuhkan penafsiran secara matang dalam artian makna bahasa menjadi sangat dinamis yang sering disebut dengan pelenturan bahasa. Sangat sukar untuk menguraikan persoalan dalam komunikasi politik, misalnya dari satu kubu politik, dengan kubu politik lainnya, yang semuanya selalu berada pada level bahasa. Sebagai instrumen politik dalam bahasa verbal maupun non verbal, selalu saja digunakan dalam komunikasi politik. Seluruh pernyataan politik tetap terus mengapresiasi segala upaya untuk mempertahankan sebuah kekuasaan atau pun juga melepaskan sebuah kekuasaan melalui diskusi melalui komunikasi politik.¹¹

Sebuah contoh tentang peran bahasa dalam komunikasi politik. Konkritnya sebuah pidato politik kenegaraan, seorang pemimpin selalu saja menghubungkan bagaimana jalan pemerintahan terbaik pada saat ia bertindak sebagai pemimpin; Seluruh isi

pidatonya yang dibangun dalam bahasa selalu membangun sikap solidaritas dalam kelompok yang besar atau pun yang kecil yang sebetulnya secara langsung ia berupaya untuk melanggengkan sebuah kekuasaan: Peran penggunaan bahasa dalam hal ini pun selalu berisikan tentang pelanggengan sebuah kekuasaan yang semuanya selalu diatur lewat penggunaan bahasa¹².

Eksistensi Bahasa dalam Wacana Komunikasi Politik

Bahasa dalam eksistensinya selalu digunakan sebagai alat ucap dalam berkomunikasi, langsung, tidak langsung yang selalu digunakan kapan saja dan di mana saja untuk menyampaikan makna yang ada dalam pikiran penutur, dan nilai yang mau diambil dari seluruh isi bahasanya. Seorang Habermas mengatakan bahwa setiap bahasa yang diucapkan selalu memiliki kepentingan, khususnya kepentingan seorang penutur, yang tentu di dalamnya pun menyiratkan makna kekuasaan. Bahasa selalu tidak netral; teks bahasa selalu direlasikan dengan konteks yang sedang dibahas atau pun yang sedang diperjuangkan dalam perjuangan politik, mulai dari tema,

¹¹Bdk. Thomas T. Pureklolon, *Komunikasi Politik*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016, uraian secara rinci pada bagian ke 5 tentang Komunikasi Politik dan Media Massa., pada hlm, 137-153.

¹² Bdk. Karlina Supeli, "Apakah Filsafat Analitik," *Driyarkara*, Jurnal Filsafat, Th. XXXII no. 1 / 2011. hlm. 18.

sampai pada maksud-maksud yang termaktub di dalamnya yang tentunya penuh dengan berbagai strategi politik dalam komunikasi politik, yang semuanya dipahami di dalam bahasa. Lewat ucapan verbal atau non verbal, bahasa dalam komunikasi politik dapat termaktub di dalamnya; dari penutur atau penguasa untuk mempertahankan sebuah kekuasaan¹³.

Terminologi wacana, menurut pendapat Foucault (1972)¹⁴ penggunaan bahasa dalam berkomunikasi harus memperhatikan wacana sosial dan seluruh prosesnya saling berkompetisi dalam suatu pengorganisasian. Menurut Rakhmad seperti terdapat dalam Foucault, bahwa bahasa dalam wacana sebagai sebuah aspek sentral; bahwa makna dan nilai ideologi dapat tersampaikan lewat bahasa. Seorang pemikir, Oduori (2002) di Kenya, dalam studinya mengatakan bahwa, peran bahasa dalam arena politik selalu digunakan oleh para pemimpin dalam mempertahankan seluruh otoritas kekuasaannya yakni lewat pemanipulasian makna bahasa. Dalam konteks Indonesia,

seluruh studi bahasa dan teks dalam komunikasi politik, selalu saja ditafsirkan maknanya. Seperti Sam Mukhtar Canosgo, membuat sebuah kajian tentang banyak hal antara lain membuat kajian tentang hermeneutis historis terhadap sebuah teks dan dokumen-dokumen kebijakan lainnya pada masa Orde Baru.

Bahasa dalam Kekuasaan dan dalam Wacana Komunikasi Politik

Dalam perspektif komunikasi politik, setiap kemampuan dan kapasitas yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi selalu digunakan untuk melakukan pengontrolan; itulah yang disebut bahasa kekuasaan. Jumlah kekuasaan sangat ditentukan oleh banyaknya relasi yang dibangun oleh segenap anggota dalam suatu komunitas, yang selalu bekerja sama dari waktu ke waktu yang terjadi di tempat yang sama dan pada waktu yang sama yang terjadi lewat bahasa¹⁵ dengan uraiannya sebagai berikut: Pertama, kekuasaan itu dapat dipraktikkan dalam artian fungsinya sebuah kekuasaan mestinya terlihat secara jelas dan dapat dipraktikkan agar bisa dinilai tingkat pergeserannya. Kedua, bekerjanya sebuah kekuasaan dapat terjadi di dalam sebuah aturan, sistem dan

¹³ Bdk. Hafied Vangara, *Komunikasi Politik*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 31-32.

¹⁴ Michael, Foucauld, *The Archaeology of Knowledge & The Discourse on Language*. New.York: Pantheon Books, 1972, hal, 57.

¹⁵Ibid., hal 456.

regulasi yang ada di dalamnya. Ketiga model kekuasaan ini beroperasi melalui normalisasi dan juga dalam sebuah regulasi. Dan yang keempat kuasa itu bersifat produktif, dalam artian jika keseluruhan makna kekuasaan tersebut dipahami secara baik dan benar dalam bahasa yang sebenarnya, maka kekuasaan menjadi sangat dinamis dan menjadi tidak kaku. Seseorang yang memiliki kekuasaan, secara terus menerus melakukan konsolidasi terhadap segala hal yang terjadi secara langsung lewat budayanya; dan di sanalah peran bahasa sebagai sebuah strategi yang dapat digunakan oleh siapa saja.

Fairlog, dalam pandangannya tentang wacana, menyampaikan pemikiran dalam beberapa hal penting yakni: pertama, keterkaitan antara wacana sebagai simbol yang menunjuk pada sebuah kekuasaan yang secara nyata, Kedua, kekuasaan merupakan hal yang bersifat artifisial yang tetap dan terus-menerus diperjuangkan.; hal ini dinamakan sebagai: di belakang wacana terdapat kekuasaan; dan inilah yang terus menerus terjadi dalam sebuah perjuangan dalam komunikasi politik. Wacana tentang komunisme misalnya, selalu menguat

dalam rezim Soeharto.¹⁶ Wacana ini masuk dalam seluruh level kehidupan masyarakat, mulai dari masyarakat pada lapisan bawah yang disebut masyarakat proletar dan masyarakat pada lapisan atas yang disebut dengan elit politik. Sebetulnya wacana tersebut digunakan secara ampuh dalam berkomunikasi untuk mendiskreditkan pemerintahan Soekarno yang tidak untuk melihat hal-hal yang bersifat positif yang berada di dalamnya. Kepemimpinan pada zaman Soeharto menjadi sangat dinamis dengan memperhatikan pertautan yang terjadi antara bahasa dan kekuasaan. Para pemimpin bertindak sebagai pengendali sejarah berdasarkan kepentingan politik yang terus terlihat dalam komunikasi politiknya..

Relasi Bahasa dan Kekuasaan

Jika dilihat secara gamblang, terjadi distingsi atau perbedaan antara bahasa dan kekuasaan yang terus dilihat secara terpisah¹⁷ . Bahasa, khususnya ragam bahasa selalu terbangun dalam kata,

¹⁶ Anderson Benedict, "The Languages of Indonesia Politics", Indonesia, No. 1, Spring Ithaca, New York: Cornel Modern Indonesia Project, 1966.

¹⁷ Christina Purwanti, "Analisis Krisis atas Bahasa Hukum dan Distorsi Bahasa dalam Hukum", Jurnal Law Review UPH , Volume XIV, No 3- Maret 2016. hal, 458.

kalimat, paragraf, dan akhirnya membentuk sebuah teks, yang berada di dalam sebuah konteks tertentu; Sedangkan kekuatan bahasa dapat terlihat pada para politisi yang menggunakan bahasa dalam seluruh prospek komunikasi politik yang terjadi.

Konsekuensi selanjutnya yang terus terlihat antara politik dan bahasa adalah pemahaman bahasa yang kemudian disebut linguistik deskriptif; sedangkan pemahaman bahasa dalam komunikasi politik disebut sebagai politik bahasa karena mempersempit makna sesuai kondisi politik yang terjadi.

Pemahaman bahasa seperti tergambar di atas, maka antara bahasa dan komunikasi politik, 'tidak ada' titik temu karena sangat berbeda kajiannya. Titik kajian bahasa masuk dalam linguistik, sedang titik kajian komunikasi politik, masuk di dalam kepentingan politik. Perjumpaan bahasa dan kekuasaan dapat dimaknai setelah kaum post strukturalis seperti Habermas dkk, mengatakan bahwa dalam hidup manusia, betapa pentingnya dan urgennya bahasa dan kekuasaan.¹⁸

Kaum post-strukturalis¹⁹ juga dapat menerima dan membuka diri untuk menerima bahwa bahasa pun diperoleh melalui dimensi fungsi bahasa, seperti lazimnya dilakukan oleh seorang dosen bahasa yang melakukan kajian lewat studi kepustakaan, karena itu dalam berkomunikasi, ilmu bahasa bisa membawa pengguna bahasa sesuai dengan teks dan konteksnya seperti sebuah teks yang sebenarnya. Di sinilah bahasa lahir dan hadir secara fungsional dalam komunikasi politik dan tampak sebagai sebuah disiplin ilmu yang disebut sebagai makro linguistik karena fungsi bahasa memiliki ruang lingkup yang sangat luas; Dalam kajian yang sedang dilaksanakan sekarang dalam tulisan ini adalah komunikasi-politikolinguistik.

Manusia sebagai pemilik bahasa dengan berbagai unsur budaya yang terserap dalam pergaulan antar budaya, di mana pengguna bahasanya ada di dalam beraneka suku dan budaya serta beragam akar budayanya, yang lazim disebut multikulturalisme. Penggunaan bahasa dalam kaitan langsung dengan kekuasaan politik dewasa ini sering terjadi kesalahpahaman karena masuk dalam

¹⁸ William Ebenstein, op.cit, hal. 257.

¹⁹ F. Budi Hardiman, lihat pada bagian , menafsir teks, op.cit., hal. 48.

kultur budaya yang selalu tidak sama dalam kehidupan manusia.

Wacana bahasa dalam komunikasi dapat sejalan dengan arena di mana sebuah kekuasaan beroperasi yang selalu berkaitan erat dengan relasi kekuasaan yang sangat muda untuk dipahami antara bahasa dan kekuasaan dalam pandangan Anthony Gramsci yaitu bahasa yang bersifat koersif dan bahasa yang bersifat hegemoni.²⁰

Struktur Bahasa dan Masyarakat.

Hegemoni bahasa adalah bagian yang tak dapat dipisahkan dari bahasa dan struktur masyarakat, di mana bahasa sudah terinternalisasi dalam sebuah kehidupan masyarakat yang dapat disebut sebagai bahasa bersama dalam sebuah masyarakat karena memiliki isi pikiran yang sama. Setiap anggota dari suatu masyarakat dapat berbahasa secara fleksibel tanpa mengalami kesulitan dalam menerjemahkan maksud dan tujuannya. Jika bahasa secara langsung dihubungkan menjadi bahasa komunikasi politik maka makna dan nilai bahasa mulai mengalami pergeseran prinsip penggunaan bahasa

yakni²¹ dari makna linguistik menjadi komunikasi-politikolinguistik; dan seterusnya menjadi wacana bahasa komunikasi politik. Setiap anggota masyarakat manusia memiliki bahasa dan manusia memiliki kecerdasan aslinya tanpa kesulitan dalam berbahasa.

Lewat bahasa melalui komunikasi politik yang terucap oleh para penguasa, terlihat secara jelas maknanya bahwa siapa menguasai siapa, yang dapat terlihat dalam sebuah penuturan yang terjadi. Anthony Gramsci secara disiplin mengatakan bahwa tereksplotasinya sebuah golongan masyarakat yang tertindas secara tersurat, mereka tetap tampil mengabdikan kepada penindas mereka. Proses pengeksploitasian oleh penguasa dalam bahasa, maknanya menjadi sangat samar oleh para penguasa dan terus menerus berupaya mengaburkan makna atau pun kenyataan-kenyataan yang terlihat dengan satu tujuan yakni penguasa mau menyimpangkan tujuan dari makna yang sebenarnya; inilah yang disebut dengan bahasa dalam komunikasi politik. Penggunaan bahasa dalam komunikasi politik terjadi secara langsung dan juga terjadi secara samar-samar.

²⁰Mudjia Rahardjo, Bahasa dan Kekuasaan, <http://mudjarahardjo.com/artikel/95.html?task=view>, diakses 05 November 2019

²¹ Bdk. Saifur, Rahman, *Fellow Your Passion: Be A Writer (Strategi Alkemis Untukj Sukses Menulis)*, Jakarta, Grasindo, 2014. hlm. 30.

Penggunaan bahasa oleh penguasa dalam komunikasi politik, seringkali memiliki makna ganda dan selalu bersifat ambigu. Makna bahasa dalam komunikasi politik tidak selalu sejalan dengan makna bahasa secara lingustik dalam penggunaan bahasa yang berasal dari seorang penutur bahasa. Seorang penguasa politik dalam komunikasi politik, bisa memiliki makna politik di mana arti, makna, dan tujuan bahasa selalu diarahkan kepada kepentingan dan tujuan yang mau dicapai yakni bahasa politik yang turunkap melalui komunikasi politik.

PENUTUP

Bahasa sebenarnya bukan hanya sebagai tata bahasa, akan tetapi bahasa juga membawa muatan kepentingan dalam sebuah komunikasi yang lazimnya dinamakan komunikasi politik. Bahasa adalah ekspresi kekuasaan dari seorang penutur atau seorang komunikator secara individual atau pun secara kelompok. Karena itu, bahasa merupakan kancan perhelatan kekuasaan. Dalam fakta kehidupan sosial manusia, atau manusia dalam berkomunikasi dengan orang lain, sering menggunakan bahasa sebagai cara atau strategi untuk menghegemoni seseorang dalam arti yang sangat luas.

Dalam kancan komunikasi politik, sebuah bahasa bisa menjadi problem yang membuat konsentrasi para pengguna bahasa atau komunikator politik bisa buyar dan bisa bubar. Seluruh sejarah kehidupan manusia dan seluruh kisah manusia adalah kisah lika-laku sebuah bahasa. Dengan maknanya, bahasa mampu menggerakkan dunia untuk memiliki kekuatan. Dengan bahasa pula, komunikasi politik dapat terbangun dalam berbagai dimensi kehidupan manusia yang terus mengalir tiada henti dalam seluruh kehidupan sosial. Pedang bisa terhunus dengan bahasa dan massa dimobilisasi karena bahasa dalam sebuah komunikasi politik. Eksistensi bahasa mengalami pergeseran yang sangat dinamis di dalam ruang lingkup yang lebih luas. Bahasa sungguh memiliki kekuatan, dan penuh dengan aneka kehormatan, kebahagiaan dalam komunikasi politik. Eksistensi bahasa pun, bisa penuh dengan sakit hati, juga penuh dengan kekecewaan. Semuanya diakhiri dengan kata-kata penguasa merasa menjadi pemilik tunggal bahasa atau bahasa penguasa, karenanya siapa pun bisa tunduk dengannya. Dengan kata lain, bahasa penguasa. Bahasa yang sering digunakan dalam komunikasi politik oleh penguasa hanya berlaku

sepihak dan berjalan satu arah hanya untuk didengar dan ditaati. Lewat bahasa, dalam komunikasi politik, penguasa bisa mempertahankan kekuasaannya. Sering kali penguasa dalam mengimbangi isu yang menentangnya, bisa menggunakan bahasa sebagai alat untuk membuat orang lain atau siapa pun yang menentangnya untuk taat karena dianggap membahayakan.

Fenomena bahasa dalam keseluruhan kajian di atas, akan terus terjadi sepanjang para penguasa dan kaum cerdas pandai tidak ingin terbuka ditambah faktor bahasa dengan kekuasaan berada pada satu orang (penguasa) dalam komunikasi politik. Di sinilah, bahasa tidak lagi dapat dilihat sebagai alat komunikasi yang netral dan bebas nilai karena bahasa sudah mengandung unsur kekuasaan. Penerapan dan penggunaan bahasa dapat dipertanyakan nilai moralitasnya karena di balik bahasa tersebut, terdapat makna yang mengindikasikan martabat, dan pada saat yang sama harkat manusia menjadi menurun. Hubungan kekuasaan dan bahasa tidak dapat dipisahkan dalam komunikasi politik sebab jalannya kekuasaan bisa menjadi terbuka. Lewat penggunaan bahasa, dapatlah terdeteksi siapa yang

berkuasa dan siapa yang tidak berkuasa, sekaligus siapa menguasai siapa.

Melalui bahasa dalam komunikasi politik, bisa dibuat pencitraan terhadap seseorang termasuk penguasa. Bahasa dalam komunikasi politik, hadir sebagai jalan pencitraan pihak lain sebagai *subversive* atau penentang utama dalam realitas kehidupan sebuah bangsa. Melalui bahasa dalam komunikasi politik, seseorang pun bisa dicap sebagai inkonstitusional, anti pembangunan, anti keamanan dan lain sebagainya yang menggambarkan perlawanan terhadap negara. Bahasa dan komunikasi politik sama-sama memiliki kekuatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Benedict, Anderson, "*The Languages of Indonesia Politics*", Indonesia, No. 1, Spring Ithaca, New York: Cornell Modern Indonesia Project, 1966.
- Bosmajian Haig, *The Language of Operation*, Washington, DC: Public Affairs Press, 1989
- Ebenstein, William, *Great Political Thinkers, Plato to Present*. Third Edition, New York: Oxford University Press, 1996
- Foucault, Michael, Foucault, *The Archaeology of Knowledge & The Discourse on Language*. New York: Pantheon Books, 1972.

- Hardiman F. Budi , *Melampaui Positivisme dan Mordenitas*, Yogyakarta: Kanisius, 2003
- Latif Yudi dan Idy Subandi Ibrahim (Ed) , *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*, Bandung: Mizan, 1996
- Linda Thomas, Shan Wareing, *Bahasa, Masyarakat dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Mudjia Rahardjo, *Relung-relung Bahasa :Bahasa dalam Wacana Politik Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Aditya Media, 2002.
- Pureklolon Thomas T, *Komunikasi Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Purwanti, Christina: “Analisis Krisis atas Bahasa Hukum dan Distorsi Bahasa dalam Hukum”,
Jurnal Law Review UPH ,
Volume XIV, No 3- Maret 2015.
- Saifur, Rahman, *Fellow Your Passion: Be A Writer (Strategi Alkemis Untuk Sukses Menulis)*, Jakarta: Grasindo, 2014 .
- Riyanto, Armada, *Berfilsafat Politik*, Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Ronal Wardhhaugh, *Sociolinguistics*, USA: Blakwell Publishers Ltd, 2002.
- Stephenen Moores, Barry Handry, *Sociology*, Sevennoaks: Hodder & Staughton, 1982.
- Sulistyanto, Ari, *Militia*. Vol.1/I/I/2011, Jurnal Universitas Bung Karno, Maret 2011.
- Supeli, Karlina, “Apakah Filsafat Analitik,” *Driyarkara*, Jurnal Filsafat, Th. XXXII No. 1 / 2011.